



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

==PERUBAHAN== RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO



DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS TENAGA KERJA**

JL. PEMUDA NO. 55A MOJOSARI MOJOKERTO 61362 JAWA TIMUR
TELP. (0321) 582182 FAX. (0321) 583581

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ /5 /KEP/416-107/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara berkesinambungan dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Trwulan ke II Tahun berkenaan
 - BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB IV : Penutup
 - LAMPIRAN
- KETIGA** : Urutan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 September 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,


BAMBANG PURWANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 158.45/ 14 /KEP/416-107/2023
TANGGAL 25 September 2023

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KODE	URUSAN/SEKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	DP	RL	RENCANA KINERJA		TARGET	LOKASI	APRO KAB (Rp)	APRO PROV		SILARAN APRO		
				OUTPUT	OUTCOME				DAPO TERAKTIF	PASU (Rp)	PA	AP	OTSDAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN MELIBRASI PELAYANAN DASAR KEPENDIDIKAN												
127.21	Program Penguatan Literasi Peningkatan Daerah Kabupaten Jember				Nilai Rasio Peningkatan Daerah	80,00%	Kab. Jember	8.521.254.000					
					Jumlah Indeks Yang Terdistribusi dan Terakumulasi Serta Berkesinambungan	2 Indeks							
227.21.201	Penyusunan, Penganggaran dan Disahkan Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator program atau tugas kerja yang mencapai sesuai target		100%		4.215.000					
247.21.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		1.000.000					
	RENCANA												
	Dokumen Rencana Kerja APBD					1 Dokumen		1.750.000					
	Dokumen Rencana Kerja APBD					1 Dokumen		1.750.000					
267.21.201.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan		1.000.000					
	RENCANA												
	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Tindakan					4 Dokumen		1.000.000					
	Penyusunan Dokumen LAPD					1 Dokumen		1.000.000					

KODE	URUSAN/SEKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LINIAM	APBD 2018 (Rp)	JABID PROY		WILAYAH APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAJDI (Rp)	KL	PL	DITRISDAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepulauan Dokumen (KDP)					1 Dokumen		1.000.000					
	Solusi Sistem Kependidikan Masyarakat Pesisir Kebangsaan					1 Laporan		-					
107.01.140	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Pembelian Elemen Anggaran Perangkat Daerah		90%		4.001.001.000					
207.01.140.01	Pengadaan Dag dan Tugasan PAB			Jumlah orang yang kemungkinan gdp dan tugasan ASN		36 orang		4.001.001.000					
	RINCIAN:												
	Pembelian Dag dan Tugasan ASN					36 orang		1.140.700.000					
	Layanan Pengadaan ASN (PP)					36 orang		1.263.900.000					
	Layanan Pengadaan Gawai dan Perangkat Kendali untuk ASN					36 orang		40.200.000					
	Pembelian Jasa BUKU, Ketersediaan Dag dan ASN untuk GPO dan Pemasangan					36 Orang dan 10		36.100.000					
210.01.140.02	Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen hasil pengadaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		10 dokumen		-					
	RINCIAN:												
	Pengadaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							-					
207.01.140	Administrasi Manajemen Perangkat Daerah			Index profesionalitas dan Index Image Kerja		70%		-					
207.01.140.02	Pengadaan Paket Gawai Berbasis Jaring Kebangsaan			Jumlah paket jaringan Gawai berbasis Jaring Kebangsaan		1 Paket		-					
	RINCIAN:												
	Pengadaan Paket Jaringan Nasional					1 Paket		-					
107.01.140	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Pembelian Pengadaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%		100.000.000					
107.01.140.02	Pengadaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor			Jumlah paket perbaikan dan peningkatan kantor yang disediakan		6 Paket		50.000.000					

KODE	URAIAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APRO KAS (Rp)	APRO POKD		UGJIAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				INFO TERDAFT	PASU (Rp)	KL	Op	DITBONG
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INDUK: Perencanaan Pengelolaan Fasilitas dan Penggunaan Ruang					1 Paket		10.000.000					
207.01.208.04	Penyediaan Bahan Logistik Kertas:			Jumlah paket bahan logistik kertas yang disediakan		8 Paket		8.000.000					
	INDUK: Penyediaan Fasilitas dan Minuman Rapat					5 Paket		5.900.000					
207.01.208.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		13 Paket		20.000.000					
	INDUK: Perbaikan Ruang Cetak dan Penggandaan					13 Paket		20.000.000					
207.01.208.07	Penyediaan Bahan Material			Jumlah paket bahan material yang disediakan		1 Paket		50.000.000					
	INDUK: Perbaikan Ruang Ruang 271					1 Paket		50.000.000					
207.01.208.08	Pengembangan Ruang Koordinasi dan Koneksi SIPD			Jumlah laporan pengembangan ruang koordinasi dan koneksi SIPD		100 Laporan		32.000.000					
	INDUK: Perbaikan Ruang Pengantar Data					100 Laporan		32.000.000					
207.01.208.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perencanaan Daerah			Perantara Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perencanaan Daerah sesuai Kebutuhan		100%		100.000.000					
207.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan		70.000.000					
	INDUK: Perbaikan Jasa Komunikasi					12 Rpt		5.000.000					
	Perbaikan Jasa Air					12 Rpt							
	Perbaikan Jasa Listrik					12 Rpt		65.000.000					

KODE	URUSAN/NOVANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	SL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD K4B (Rp)	APBD PROV		SELURUH APBD		
				OUTPUT	OUTCOME				SAKIP TERAKTIF	PASU (Rp)	R1	R2	D/INDOKAN
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.07.01.2.00.00	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah layanan pelayanan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Layanan		112.000.000					
	RINCIAN :												
	Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jas K4B)					12 Layanan		112.000.000					
1.07.01.2.00	Pembayaran Saling Bina Daerah Penyelang Urutan Pemerintahan Daerah			Persentase barang hasil daerah dalam keadaan baik		100%		10.000.000					
1.07.01.2.00.00	Pengelolaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pelayanan Kandang Daerah Operasional atau Lapangan			Jumlah kandang dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibersihkan setiap saat pemeriksaan		1 Unit		44.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembayaran Pemeliharaan Kandang Dinas Kantor					1 unit		40.000.000					
	Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemeliharaan Dinas Kantor					1 unit		4.000.000					
1.07.01.2.00.00	Pembayaran / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit		10.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembayaran Rehabilitasi gedung kantor					1 unit		10.000.000					
1.07.01.2.00.00	Pembayaran / Rehabilitasi Bangunan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah rumah dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		10 Unit		10.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembayaran Rehabilitasi Bangunan Prasarana Gedung Kantor					10 Unit		10.000.000					
1.07.01	Program Pemeliharaan Tenaga Kerja				Persentase pengalihan dan kegiatan yang tersebut dilaksanakan tenaga kerja	100%		15.000.000					

KODE	URUSAN/ RENCAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	RL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAD (Rp)	APBU PROV		UTUHAN APBD		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD DAERAH	PAJDI (Pa)	KL	Rp	QTY/BIAYA
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201.01.2.01	Pengembangan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang terwujud		1 Dokumen		75.000.000					
201.01.2.01.01	Perencanaan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		1 Dokumen		75.000.000					
	RENCANA Perencanaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja					1 Dokumen		75.000.000					
207.05	Program Pelatihan Karyawan Produktivitas Tenaga Kerja				Peningkatan Produktivitas Karyawan Swasta Kampungbaru	20%	Kab. Bantul	1.222.188.000					
207.05.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Swastawerkas dan Kumpalawerkas			Jumlah orang yang telah berdasarkan unit kompetensi		144 Orang		1.137.800.000					
207.05.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pekerja Kerja Swastawerkas Kumpalawerkas			Jumlah tenaga kerja yang menyelesaikan pelatihan Swastawerkas Kumpalawerkas pada tahun n		128 Orang		1.087.800.000					
	RENCANA Pelatihan dan sertifikasi Kumpalawerkas					128 orang		109.800.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Teks Padi					18 Orang		47.800.000					
	Pelatihan Cerdas Kuda Bani					18 Orang		50.800.000					
	Pelatihan Teks Kopy					18 Orang		51.800.000					
	Program Pendidikan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (Diklat)												
	RENCANA Pelatihan dan Sertifikasi Teks Padi Penggaris (Diklat)					18 Orang		200.000.000					
	Pelatihan dan Sertifikasi Kumpalawerkas (Diklat)					18 Orang		340.000.000					
	Pelatihan dan Sertifikasi Pembuatan Pot dan Gak (Diklat)					18 Orang		230.000.000					

KODE	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	UP	SL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APSD KAB (Rn)	APSD PROV		Jumlah APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				DUPA TERBUK	PANG (Rp)	K1	K2	DITBDAR
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Tembung					3 Orang		30.000.000					
107343108	Pembinaan Kemandirian Warga			Jumlah warga warga yang dibantu oleh melalui program pelatihan kemandirian warga		30 Orang		30.000.000					
	BENCANA												
	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)					10 Orang		30.000.000					
107343109	Pengabdian Intelektual Pesisir Kerja			Persentase Fasilitas pengabdian Intelektual Pesisir Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100%		100.000.000					
1073431010	Jasa Paksi / Bunka Kerja			Jumlah peserta kerja yang mendapatkan pelatihan melalui jasa paksi / bunka kerja		40 Orang		100.000.000					
	KEKAWA												
	Jasa Paksi					20 Orang		100.000.000					
	Pembinaan Intelektual Bunka Kerja					20 Orang		100.000.000					
107343110	Pembinaan PIR (Pria dan Perempuan Pemangku) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah orang terlatih / peningkatan PIR		20 Orang		20.000.000					
107343111	Pembinaan Pembinaan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPNS PM yang dilatih dan diberikan kompetensinya		30 Orang		20.000.000					
	PMI-300												
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)					20 Orang		20.000.000					
107343112	Pembinaan Pengabdian NTA yang Lokasi Kerja dari: 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitas, koordinasi dan administrasi pengabdian NTA		20 orang		40.000.000					

KODE	URUSAN/BOANS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APRO K4B (Rp)	APRO PROV		SELURUH APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SAPO TERGAKT	PAGU (Rp)	K1	K2	OTBOKAN
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.06.100.01	Kontrol dan Nidmonevsi Penyelangan MTA yang Lahan Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Orang Peserta yang Disiapkan Fasilitas, Rotorasi dan Seleksi Penyelangan MTA		25 orang		40.000.000					
	INDICIA : Pengembangan keterampilan dan kemampuan personal dan profesional TMA					25 orang		40.000.000					
227.06	Program Hubungan Industri				Persentase Penjualan Hubungan Industri yang Disiapkan	80%	Kab. Wajene	1.800.275.000					
					Persentase Terapi Kerja yang Terjadi Jumlah Total	70%							
127.06.10	Pengembangan dan Penyelenggaraan Persediaan Hubungan Industri, Moga Kerja dan Penjualan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase terdapat peningkatan dan penyelenggaraan persediaan hubungan industri, moga kerja dan penjualan perusahaan yang tercapai sesuai target		100%		1.800.275.000					
227.06.100.01	Pengembangan Persediaan Hubungan Industri, Moga Kerja, dan Penjualan Perusahaan yang Bersifat / Berdampak pada Kemandirian di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Persediaan yang Disiapkan		4 Persediaan		100.000.000					
	INDICIA : Dukungan (sub) Murni dari Murni					40 orang		20.000.000					
	Penjualan kerja kerja dan keterampilan					50 orang		60.000.000					
	Pembinaan Hubungan Hubungan Industri					40 orang		50.000.000					
	Pembinaan Kerja dalam Persediaan					2 Kegiatan		10.000.000					
227.06.100.02	Pengembangan Persediaan Hubungan Industri, Moga Kerja, dan Penjualan Perusahaan yang Bersifat / Berdampak pada Kemandirian di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah persediaan persediaan yang terakreditasi		10 Persediaan		25.000.000					

KODE	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN DIBERHESKATKAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APRO KAS (Rp)	APRO INDIV		Jumlah APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SAPO TERKAIT	PAJ2 (Rp)	KL	Rp	OTKEDAS
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ENCANA : Peningkatan Kasus Penyalahgunaan Narkotika					10 Tersebut		25.000.000					
1.07.05.1.02.04	Pembinaan Operasional Lembaga Karyawati Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah LKS Tersebut yang ditindak		1 Lembaga		45.000.000					
	ENCANA : Pembinaan Lembaga Karyawati Tingkat					1 Lembaga		45.000.000					
1.07.05.1.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Terdapatnya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		2700 Orang		1.347.275.300					
	ENCANA : Berkurangnya tingkat pengangguran secara keseluruhan di daerah					40 Orang		51.018.750					
	Peningkatan perlindungan kesehatan dan keamanan kerja					40 Orang		45.018.750					
	Berkurangnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja					50 Orang		56.018.750					
	Berkurangnya angka dan persentase kecelakaan kerja					30 Orang		18.018.750					
	Peningkatan Sosial Kesejahteraan untuk pekerja terbatal dan Pekerja Penda yang tidak Pemeriksaan Data Ringkasan Data Hasil Tertinggi (DHRIT)					27140 Orang		1.356.100.400					
	Jumlah							3.546.140.400					

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,
DISNAKER
BARISANG PURWANTO

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 80 Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan namanya akan dituangkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dimana terdapat (lima) program yang terdiri dari 3 (Tiga) Program Prioritas dan 2 (dua) program pendukung.

Harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu perubahan indikator Tahun 2023.

Mojokerto, September 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



BAMBANG PURWANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590521 199602 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN BERSTRA OPD	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	17
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	18
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD	19
2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	35
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	35
3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	49
BAB V PENUTUP	62



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, Pasal 3 yaitu “Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah”, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta berdasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang, peninjauan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Perubahan Renja OPD ditetapkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian P- RKPD tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n.

Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto membuat Perubahan Renja yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terukur. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disaker) disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, maka dalam penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat sebagai bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Selain itu

Perubahan Renc ini menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto jundo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dan hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal;

- E. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Urutan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengamplasan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

a. Maksud

1. menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk penyusunan program kegiatan
2. menentukan lokasi kegiatan dan menyusun indikator kinerja kegiatan
3. serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar pembangunan di bidang ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Tujuan

Tujuan disusunnya perubahan Rencana kerja adalah sebagai penjabaran dokumen perumusan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan pada tahun N sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Rencana Perangkat Daerah. Proses penyusunan perubahan Rencana Perangkat Daerah. Keterkaitan antara RENJA PD dengan dokumen RKPD, RENSTRA PD, RENJA KL dan RENJA PROVINSI. Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta ketentuan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rerja OPD tahun lalu dan perhitungan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rerja OPD tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan OPD dan isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi uraian tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada Renja tahun lalu dan pencapaian target Renstra OPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Dokumen Renstra OPD. Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 pada umumnya dapat tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dan disajikan pada tabel pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.1
 RINCIAN CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	REKAPITULASI	PERSENTASE REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			88,10%	72,00%
		PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		100%	88,10%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	98,10%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	98,00%
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		100%	80,67%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	80,67%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%
		ADMINISTRASI SARAN PERANGKAT DAERAH		100%	84,70%
			Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor	90,9%	80,62%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	80,77%
			Penyediaan Sarung Dapur dan Peralatan	80,0%	80,42%
			Penyediaan Saran / Material	100%	80,90%
			Penyediaan dan Kumpul Kebutuhan dan Kebutuhan Dapur	100%	94,00%

NO	PROGRAM	KEDATANG	SUB KEDATANG	PERSENTASE REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI BUDJET
		PENYEDIAAN JASA PEMBUANG URUSAN Pemerintahan DAERAH		100%	83,77%
			Penyediaan Jasa Konsultan, Gubuk, Dapur Air Dan Listrik	100%	78,45%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	100%	96,11%
		PEMBELIHAN BARANG MILIK DAERAH PEMBUANG URUSAN Pemerintahan DAERAH		100%	85,77%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagar, Dan Perbaikan Kendaraan Dan Operasional Adu Layanan	100%	96,07%
			Pembelian/Konsumsi Gedung Kantor Dan Berkas Lain-lain	70%	98,79%
			Pembelian/Konsumsi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Berkas Lain-lain	100%	100%
	PROGRAM PELATIHAN KEURUFAN PRODUCTIVITAS TENAGA KERJA			78,44%	62,88%
		PELAKSANAAN PELATIHAN BERKADARSI (JND) KOMPETENSI		15,79%	98,25%
			Proses Pelaksanaan Pendukung Dan Pelayanan Kearsifan Ragi, Pemas, Kerja Rekrutmen Kader Kempas	18,75%	98,25%
		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KURUS SWASTA		100%	73,00%
			Pembinaan Lembaga Pembinaan Kurus Swasta	100%	73,00%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			105,2%	94,38%
		PELAYANAN ANTAR-DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	67,42%
			Penyediaan Survei Data Pelayanan Antar Kelas	100%	80,39%
			Pelayanan Antar Kelas	100%	85,81%
			Penyediaan Kearsifan Kelas	100%	94,80%
		PENGLOKASI INFORMASI PASAR KERJA		0%	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERSENTASE REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
			Jat Fall Busa Kaca	0%	0%
		PENGHISTARIAN PERHIMPUNAN BATA DINO LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATENKOTA		100%	95,6%
			Kontribusi Gak Simpangan Pengembangan Inter Yang Lokasi Kerja Dalam 1 Daerah Daerah KabupatenKota	100%	95,6%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			104,3%	94,2%
				100%	
		PENGELOMPOKAN DAN PENYELESAIAN PERGELUTAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MODER KERJADAN FEMILITARIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATENKOTA		67,2%	84,2%
			Pengembangan Perwakilan Hubungan Industrial, Mopk Kerja, Dan Perbaikan Perwakilan Yang BerakutBerakut Pada Kependidikan Di 1 (Satu) Daerah KabupatenKota	77,2%	87,8%
			Pengembangan Perwakilan Hubungan Industrial, Mopk Kerja, Dan Perbaikan Perwakilan Yang BerakutBerakut Pada Kependidikan Di 1 (Satu) Daerah KabupatenKota	70%	81,2%
			Pengembangan Organisasi Lembaga Kependidikan Tingkat Daerah KabupatenKota	50%	67,5%
			Pengembangan Pelayanan Jasa Sosial Tenaga Kerja Dan Tugas Kependidikan Pekerja	100%	74,8%

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan, untuk pencapaian kinerja sebesar 99,10%, sementara persentase realisasi anggaran sebesar 72,08%.

2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Indikator dari program ini adalah persentase peningkatan pencari kerja yang dilatih. Pada tahun 2021 realisasi capaian keuangan sebesar 62,68% dan realisasi capaian kinerja sebesar 79,44%. Program ini terdiri dari 2 (dua) dan 2 (dua) sub kegiatan.

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Indikator dari program penempatan tenaga kerja adalah persentase peningkatan jejaring informasi lowongan kerja pada perusahaan. Pada tahun 2021 realisasi capaian keuangan sebesar 64,30% mengalami penurunan daripada tahun 2020 sebesar 71,54% dikarenakan anggaran difokuskan, akan tetapi untuk realisasi capaian kinerja sebesar 15,76% dari target 15% yang ditentukan pada Rencana Kerja Tahun 2021. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Indikator program hubungan dan program hubungan industrial adalah persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dan Persentase perusahaan yang dimonitor. Pada tahun 2021 realisasi capaian keuangan sebesar 84,20% mengalami penurunan daripada tahun 2020 sebesar 95,0% dan ini dikarenakan dampak dilaksanakannya refocusing anggaran pelaksanaan kegiatan. Namun untuk realisasi kinerja sebesar 104,05% dan indikator Persentase Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dan Persentase perusahaan yang dimonitor sebesar 100%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub Kegiatan.

Selanjutnya pencapaian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29:

TABEL TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SID TAHUN 2021
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RESTRU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN N-2021 (N-2021)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LAJU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2021	PERUBAHAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KE TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2021)	TARGET REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SD TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (%)	12	13 = 14 - 11	14
1					URUSAN WAJIB								
1	14				KETERANGAN								
2	17	11			PROGRAM PENYANGGUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH								
					SKOR PROFESIONALITAS ASN PERANGKAT DAERAH								
					PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG TERCAPI								
					INDEKS KUPUSAS BUDIDAYA/ATI APRIKAT TERKADAP PELAYANAN KESERHATAN/ARTAS DINAS YANG KURJA								

2	07	01	221		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN YANG TERVISIT	2 dokumen	15	4	4	100 %	4	25	4,00
1	07	01	221	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tervisit	1 dokumen	8	2	2	100 %	2	12	4,00
2	07	01	221	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Dan Data Ketersediaan Dan Keterseragaman	1 dokumen	8	1	1	100 %	1	5	5,00
						Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Keterseragaman	1 dokumen	1	1	1	100 %	1	5	5,00
1	07	01	222		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN	28 laporan	78	28	28	100 %	28	120	5,00
2	07	01	222	01	Penyediaan Dag Dan Tunggai Asn	Jumlah Rinci Penyediaan Dag Dan Tunggai	14 laporan	42	14	14	100 %	14	75	5,00
2	07	01	222	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	36	12	12	100 %	12	60	5,00
2	07	01	226		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN AKTUALISASI DAN KEPERAWAN YANG TERVISIT	121 laporan	363	121	121	100 %	121	600	5,00
2	07	01	226	02	Penyediaan Perizinan Dan Peringkasan Kertas	Jumlah Penyediaan Perizinan Dan Peringkasan Kertas	11 laporan	33	11	11	100 %	11	55	5,00
2	07	01	226	04	Penyediaan Saluran Logistik Kertas	Jumlah Penyediaan Penyediaan Saluran Dan Minuman	8 laporan	24	8	8	100 %	8	40	5,00
2	07	01	226	05	Penyediaan Barang, Logistik Dan Pengiriman	Jumlah Penyediaan Barang Logistik Dan Pengiriman	11 laporan	33	11	11	100 %	11	55	5,00
2	07	01	226	07	Penyediaan Saluran / Udara	Jumlah Penyediaan Saluran / Udara Asn Tug Kertas	1 laporan	3	1	1	100 %	1	5	5,00

2	07	01	2.00	05	Penyediaan Paket Kebutuhan Dan Kebutuhan Sifat	Jumlah Penyediaan Penyediaan Paket Paket Dan Kebutuhan Ke Luar Dan Dalam Daerah	100 kg/pekar	30	30	30	100%	30	30	30	1.00
2	07	01	1.00		PELAYANAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24 bulan	12	34	34	100%	34	34	34	1.00
2	07	01	1.00	01	Penyediaan Jasa Kebutuhan, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	30	30	30	100%	30	30	30	1.00
2	07	01	1.00	02	Penyediaan Jasa Pengiriman Urut Kotor	Jumlah Penyediaan Pelaksanaan Jasa Pengiriman Urut Kotor	12 bulan	30	30	30	100%	30	30	30	1.00
2	07	01	2.00		PELAKSANAAN BARANG MELI DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan BARANG MELI DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24 bulan	111	37	37	100%	37	37	37	1.00
2	07	01	2.00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Servis Pemeliharaan, Perek, Dan Perbaikan Sederhana Dan Operasional Alat Lengkapan	Jumlah Unit Pemeliharaan Yang Dilakukan Pemeliharaan	6 semester	30	30	30	100%	30	30	30	1.00
2	07	01	2.00	02	Penyediaan/Perbaikan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan/Perbaikan Pemeliharaan Ruko Gedung Gedung Kantor	1 kegiatan	1	1	1	100%	1	1	1	1.00
2	07	01	2.00	03	Penyediaan/Perbaikan Suku Cadang Dan Peralatan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	30 unit	30	30	30	100%	30	30	30	1.00
2	07	01			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUCTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENINGKATAN PENCAR KERJA YANG SEHAT	75%	55%	55%	62%	100%	75%	75%	75%	20%

2	01	04	201	01	Kenyataan Sumber Daya Manusia Asli Raja	Jumlah Dokumen Pendukung Penyediaan Sumber Daya Padi Pemerintah Asli Raja	1 dokumen	1	1	1	100%	1	1	1	1.01
3	01	04	201	02	Pemerintah Asli Raja	Jumlah A/R Tersempit Dari Data Lokasi Teras Yang Lupa Hal Umur A/R: 30 orang	3 A/R	14	1	1	80%	3	31	1	1.02
4	01	04	201	03	Pemerintah Tersempit Raja	Jumlah Penerima Teras Meningkatkan Fasilitas Pertanian Kawasan Raja	20 orang	14	21	42	100%	21	42	1	1.03
5	01	04	201		PENGELUARAN INFORMASI PUSAKA KERJA	JUMLAH PENERBITAN PENGALAMAN / PENGALAMAN JADAR BUKA TERASA KERJA	100 orang	210	80	80	100%	210	80	1	1.04
						JUMLAH STANDI PERHUKUMAN PENTAS INFORMASI LUMBUKAR KERJA	40 orang	40	30	30	100%	30	100	1	1.05
6	01	04	201	01	Jak Fatah Raja	Jumlah Penerima Penerimaan Penerimaan Informasi Raja Teras Raja	10 orang	24	30	30	100%	30	30	1	1.06
						Jumlah Orang / Penerimaan Penerimaan Informasi Lumbung Raja	40 orang	40	30	30	100%	30	100	1	1.07
7	01	04	201		PENGABITAN PERHUKUMAN RPA YANG LOKAS KERJA DALAM 1 (SATU) DASAR NASIPATENOTA	JUMLAH ORANG YANG DIBERIKAN PENGABITAN PENGABITAN PERHUKUMAN RPA	20 orang	110	80	80	100%	8	210	1	1.08
8	01	04	201	01	Kendaraan Dari Karyawan Tersempit Jasa Yang Lupa Raja Dalam 1 Dasi: Dari Karyawan Raja	Jumlah Orang Penerima Yang Diberikan Fasilitas Penerimaan Informasi Penerimaan Raja	10 orang	10	40	40	100%	4	210	1	1.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE KASUS PERSELESIHAN PERUSAHAAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN	40%	50%	60%	80%	100%	80%	120%		
						PERSENTASE PERSELESIHAN YANG DIMONITOR	70%	8	9	9	8	70%	80%		
2	3	4	5	6	7	PERENCANAAN DAN PENYELESAIAN PERSELESIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, NEGOTIASI DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/NUNTA	JUMLAH ORANG YANG DIBERIKAN FASILITAS PERENCANAAN PERUSAHAAN	115 orang	20	20	30	100 %	1	100	1.12
						PERSENTASE AKUTISIDITASI RAPAT PERUSAHAAN	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100	1.10	
						JUMLAH PANGKASAH PERSELESIHAN	20 pangkasah	8	11	30	100%	16	12	4.15	
						JUMLAH PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN FASILITAS PERENCANAAN DAN KESERBUHAN KOLLA	200 perusahaan	40	115	111	100%	95	400	1.40	
2	3	4	5	6	7	Perencanaan, Penyelesaian, Hubungan Industrial, Negosiasi, dan Penutupan Perusahaan Yang Berkegiatan di Daerah Kabupaten/NunTA	Jumlah Orang Yang Diberikan Fasilitas Perencanaan Perencanaan	110 orang	20	20	30	100 %	1	100	1.12
						Jumlah Orang Yang Diberikan Fasilitas Perencanaan	100	20	1	1	100%	1	10	4.10	
2	3	4	5	6	7	Perencanaan, Penyelesaian, Hubungan Industrial, Negosiasi, dan Penutupan Perusahaan Yang Berkegiatan di Daerah Kabupaten/NunTA	Jumlah Perencanaan Perencanaan	30 pangkasah	30	30	30	100 %	11	10	4.15
2	3	4	5	6	7	Perencanaan, Penyelesaian, Hubungan Industrial, Negosiasi, dan Penutupan Perusahaan Yang Berkegiatan di Daerah Kabupaten/NunTA	Jumlah Orang Perencanaan	1 orang	5	5	1	100%	5	5	1.10
2	3	4	5	6	7	Perencanaan, Penyelesaian, Hubungan Industrial, Negosiasi, dan Penutupan Perusahaan Yang Berkegiatan di Daerah Kabupaten/NunTA	Jumlah Orang Yang Diberikan Fasilitas Perencanaan	300 perusahaan	40	115	111	100 %	95	400	1.40

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berikut kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, antara lain:

1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja;
2. Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten;
3. Persentase tingkat penyelesaian hubungan industrial di perusahaan;
4. Persentase Perusahaan Yang Mengikutsertakan Pekerja dalam Jaminan Sosial.

Target dan realisasi pencapaian dari 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel TC-30.

TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPN STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2022	2023	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PERSENTASE PENYERAPAN TENAGA KERJA			82%	80%			82%	80%	
2	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG BERKUALITAS DAN KOMPETEN			85%	85%			85%	85%	
3	PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN			95%	95%			95%	95%	
4	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM JAMINAN SOSIAL			75%	75%			75%	75%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berikut isu-isu penting keleragaan yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja diantaranya sebagai berikut:

NO	ISU-ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
1	Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPPT):	Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPPT) yang masih berada di bawah target yang dicarangkan yaitu 3,45%, sementara pencapaian angka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,58%. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya penduduk usia angkatan kerja yang belum mempunyai keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri dan kewirausaha, sehingga sulit bersaing di pasar bebas baik di level lokal, daerah dan luar Daerah serta ekskurasi menghadapi era industri 4.0.	Berikut beberapa Pakehan yang berbasis kompetensi dan sertifikasi dalam berbagai sektor usaha berbasis pencari kerja yang dengan bentuk uji kompetensi agar pencari kerja tenaga kerja melalui materi tentang di level lokal, daerah dan luar daerah khususnya kawasan dapat menghadapi era industri 4.0. Selain itu meningkatkan pendidikan tenaga kerja serta informasi kerja ke daerah bentuk tenaga kerja serta meningkatkan pembinaan serta penguatan keterampilan kerja dengan berkoordinasi dengan para perusahaan agar dapat membuka sektor pekerjaan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.
2	Kurangnya Pemindungan dan Fasilitas Kompetensi Tenaga Kerja di perusahaan	1. Masih banyaknya perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Mookerto yang belum melaksanakan norma keleragaan yang baik dan benar termasuk penyediaan sarana dan prasarana keleragaan kerja K2 yang belum berada di perusahaan di wilayah Kabupaten Mookerto. 2. Minimnya angka Tenaga Kerja yang ikut masuk ke dalam Program Jaminan Sosial (JCS) BPJS Keleragaan sebagai fasilitas wajib dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.	1. Berikut perlu dilaksanakan pembinaan maupun sosialisasi peningkatan norma kerja, sosialisasi program sarana dan prasarana keleragaan kerja (K2) di perusahaan akan bentuk monitoring secara langsung dan bentuk sebagai sarana hubungan industrial untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di wilayah Kabupaten Mookerto. 2. Berikut perlu dilaksanakan pembinaan maupun sosialisasi agar perusahaan di wilayah Kabupaten Mookerto melaksanakan seluruh peraturan ke dalam program BPJS Keleragaan sebagai bentuk preventif secara langsung untuk meningkatkan nilai-nilai yang tidak terduga serta untuk menciptakan keleragaan dan kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja di tempat kerjanya.
3	Tingginya risiko Penolakan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mookerto	Tingginya angka Penolakan Hubungan Industrial antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja.	Berikut dengan banyaknya faktor faktor penyebab terjadinya penolakan Hubungan Industrial yang terjadi di wilayah Kabupaten Mookerto sebagai

			contoh lain yang paling banyak terjadi adalah tingginya angka Upah Minimum Kerja sehingga banyak perusahaan yang mereduksi untuk bertahan atau survive dengan cara mengurangi jumlah karyawan maka perusahaan (tubuh)nya juga mereduksi atau perusahaan perusahaan sebagai cara yang terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak pengusaha agar dapat terus menjalankan perusahaannya bisa dapat bertahanlah lagi. Maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto ini akan mengembangkan secara khusus pendataan secara nasional maupun pembinaan hubungan industrial dalam bentuk klasifikasi dan perusahaan agar setiap perusahaan yang terjadi dapat terakumulasi di tingkat perusahaan secara agresi.
4	Kurangnya perlindungan dan fasilitas terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PM)	Lonarnya perlindungan dan fasilitas terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PM)	Perburuan pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap perlindungan dan fasilitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PM) dan proses dan tata cara pemberangkatan, selama bekerja dan setelah hubungan kerja berakhir (pembayaran)
5	Kurangnya Atmo Masyrakat terhadap Fasilitas Transmigrasi	Fasilitas transmigrasi masih belum optimal akan peningkatan kuantitas dan kualitas Masyrakat	1. Meningkatnya kuantitas calon transmigran 2. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat terhadap fasilitas transmigrasi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review Rancangan RKPD dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada tabel TC-51

TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	PERUBAHAN RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN & PENTING
	PERUBAHAN KEGIATAN SUB-KEKAWILAN	LOKASI	INDUKSI KAWILAN PELOPORAN INDUKTOR KELOMPOK KEMASYARAKATAN	SAJUT CAKUPAN	PAJAK BENCANA Rp	PERUBAHAN KEGIATAN SUB-KEKAWILAN	LOKASI	INDUKSI KAWILAN PELOPORAN INDUKTOR KELOMPOK KEMASYARAKATAN	SAJUT CAKUPAN	PAJAK BENCANA Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN KAWILAN BAWA PELAYANAN KAWILAN					URUSAN KAWILAN BAWA PELAYANAN KAWILAN					
	KETERANGAN/REMARK					KETERANGAN/REMARK					
1.01.01	Program Peningkatan Pembinaan Desa Kabupaten T. Klaten	Desa Klaten Klaten	Desa Klaten Klaten	Desa Klaten Klaten	1.000.000.000	Program Peningkatan Pembinaan Desa Kabupaten T. Klaten	Desa Klaten Klaten	Desa Klaten Klaten	Desa Klaten Klaten	1.000.000.000	
			Desa Klaten Klaten	Desa Klaten Klaten				Desa Klaten Klaten	Desa Klaten Klaten		
1.01.01.01	Pembinaan, Peningkatan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa		Pembinaan Peningkatan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	Desa Klaten Klaten	1.000.000.000	Pembinaan, Peningkatan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa		Pembinaan Peningkatan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa	Desa Klaten Klaten	1.000.000.000	
1.01.01.01.1	Pengembangan Sistem Pembinaan Perangkat Desa		Sistem Pembinaan Perangkat Desa	Desa Klaten Klaten	1.000.000.000	Pengembangan Sistem Pembinaan Perangkat Desa		Sistem Pembinaan Perangkat Desa	Desa Klaten Klaten	1.000.000.000	
	REMARK:					REMARK:					
	Saluran Perantara Desa Klaten			1 Desa Klaten	1.000.000.000	Saluran Perantara Desa Klaten			1 Desa Klaten	1.000.000.000	
	Saluran Perantara Desa Klaten			1 Desa Klaten	1.000.000.000	Saluran Perantara Desa Klaten			1 Desa Klaten	1.000.000.000	



KODE	PROGRAM RPPD SD					DAIRAH RAJAGARJUNG					LOKASI & FUNGSI
	PROGRAM KEGIATAN/KEKAWATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA/PELOUARI/INDIKATOR KINERJA/KEKAWATAN	TARGET CAPAIAN	PAJAK BOKATIF (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/KEKAWATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA/PELOUARI/INDIKATOR KINERJA/KEKAWATAN	TARGET CAPAIAN	PAJAK BOKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023/2024 1	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	
	BK/DA					BK/DA					
	Program Kerja Perangai Samb Samb			4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb Samb			4 Laporan	1.200.000	
	Program Kerja Perangai Samb Samb			4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb Samb			4 Laporan	1.200.000	
	Program Kerja Perangai Samb Samb			4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb Samb			4 Laporan	1.200.000	
	Program Kerja Perangai Samb Samb			4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb Samb			4 Laporan	1.200.000	
2023/2024 2	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	
2023/2024 3	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	
2023/2024 4	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	
2023/2024 5	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	
2023/2024 6	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	
2023/2024 7	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	
2023/2024 8	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	
2023/2024 9	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	
2023/2024 10	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	
2023/2024 11	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	
2023/2024 12	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	Program Kerja Perangai Samb		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangai Samb	4 Laporan	1.200.000	

KODE	PERUBAHAN APBD 2021					HASIL ANALISIS KEBERSTABILAN					CATATAN & PENJELASAN
	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGATAN	TARGET CAPAIAN	INDIKATOR Jumlah (Rp)	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGATAN	TARGET CAPAIAN	INDIKATOR Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.21.2.06.4 4	Pengadaan Bahan Logistik Kesehatan		Jumlah paket bahan logistik kesehatan yang dibutuhkan	1 Paket	5.000.000	Pengadaan Bahan Logistik Kesehatan		Jumlah paket bahan logistik kesehatan yang dibutuhkan	1 Paket	5.000.000	
	BENCANA					BENCANA					
	Pengadaan Bahan dan Bahan Logistik			1 Paket	5.000.000	Pengadaan Bahan dan Bahan Logistik			1 Paket	5.000.000	
207.21.2.06.5 5	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman		Jumlah paket barang cetak dan pengiriman yang dibutuhkan	11 Paket	25.000.000	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman		Jumlah paket barang cetak dan pengiriman yang dibutuhkan	11 Paket	25.000.000	
	BENCANA					BENCANA					
	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman			11 Paket	25.000.000	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman			11 Paket	25.000.000	
207.21.2.06.6 6	Pengadaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan / material yang dibutuhkan	1 Paket	30.000.000	Pengadaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan / material yang dibutuhkan	1 Paket	30.000.000	
	BENCANA					BENCANA					
	Pengadaan Bahan / Material BDR			1 Paket	30.000.000	Pengadaan Bahan / Material BDR			1 Paket	30.000.000	
207.21.2.06.7 7	Pengembangan Riset Kesehatan dan Kesehatan SDG		Jumlah laporan pengembangan a riset kesehatan dan kesehatan SDG	100 Laporan	11.000.000	Pengembangan Riset Kesehatan dan Kesehatan SDG		Jumlah laporan pengembangan a riset kesehatan dan kesehatan SDG	100 Laporan	11.000.000	
	BENCANA					BENCANA					
	Pengembangan Riset Kesehatan SDG			100 Laporan	11.000.000	Pengembangan Riset Kesehatan SDG			100 Laporan	11.000.000	

KODE	PERUSAHAAN RAKTI 2023					RESEL JAWA, DOK. KETENTUAN					CATATAN & PORTING
	PROGRAM KEGIATAN/ SUB AKTIVITAS	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA RESIDUAL	TARGET CAPAIAN	PHYSIOLOGICAL (Rp)	PROGRAM KEGIATAN/ SUB AKTIVITAS	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA RESIDUAL	TARGET CAPAIAN	PHYSIOLOGICAL (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01.01.1.01	Pengembangan Jasa Pemangkas Rambut Perawatan Rambut		Pengembangan Jasa Pemangkas Rambut Perawatan Rambut	100%	107.500.000	Pengembangan Jasa Pemangkas Rambut Perawatan Rambut		Pengembangan Jasa Pemangkas Rambut Perawatan Rambut	100%	107.500.000	
2.01.01.1.01.1	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus		Jumlah layanan perawatan jasa perawatan rambut gaya baru dan lurus yang diberikan	12 Layanan	12.000.000	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus		Jumlah layanan perawatan jasa perawatan rambut gaya baru dan lurus yang diberikan	12 Layanan	12.000.000	
	INDICATOR					INDICATOR					
	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus			120%	12.000.000	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus			120%	12.000.000	
	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus			120%	12.000.000	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus			120%	12.000.000	
2.01.01.1.01.2	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus		Jumlah layanan perawatan jasa perawatan rambut gaya baru dan lurus yang diberikan	12 Layanan	12.000.000	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus		Jumlah layanan perawatan jasa perawatan rambut gaya baru dan lurus yang diberikan	12 Layanan	12.000.000	
	INDICATOR					INDICATOR					
	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus			120%	12.000.000	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus			120%	12.000.000	
2.01.01.1.01.3	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus		Jumlah layanan perawatan jasa perawatan rambut gaya baru dan lurus yang diberikan	12 Layanan	12.000.000	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus		Jumlah layanan perawatan jasa perawatan rambut gaya baru dan lurus yang diberikan	12 Layanan	12.000.000	
	INDICATOR					INDICATOR					
	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus			120%	12.000.000	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus			120%	12.000.000	
2.01.01.1.01.4	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus		Jumlah layanan perawatan jasa perawatan rambut gaya baru dan lurus yang diberikan	12 Layanan	12.000.000	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus		Jumlah layanan perawatan jasa perawatan rambut gaya baru dan lurus yang diberikan	12 Layanan	12.000.000	
	INDICATOR					INDICATOR					
	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus			120%	12.000.000	Pengembangan Jasa Perawatan Rambut Gaya Baru dan Lurus			120%	12.000.000	

[illegible]

KODE	RUMAH BANGUN BUDU					RUMAH BANGUN KUDATAM					CATATAN & REMARK
	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM BUDU/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PADA BERSAMA Rp	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM BUDU/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PADA BERSAMA Rp	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
20190320	Pembinaan Lomba Pelebaran Karya Samsu		Jumlah Lomba Pelebaran Karya yang dibuat	10 Lomba	10.000.000	Pembinaan Lomba Pelebaran Karya Samsu		Jumlah Lomba Pelebaran Karya yang dibuat	10 Lomba	10.000.000	
20190321	Pembinaan Lomba Pelebaran Karya Samsu		Jumlah Lomba pelebaran Karya samsu yang dibuat	10 Lomba	10.000.000	Pembinaan Lomba Pelebaran Karya Samsu		Jumlah Lomba pelebaran Karya samsu yang dibuat	10 Lomba	10.000.000	
	REKAM			10.0%	10.000.000	REKAM			10.0%	10.000.000	
	Pembinaan Lomba Pelebaran Karya Samsu			10.0%	10.000.000	Pembinaan Lomba Pelebaran Karya Samsu			10.0%	10.000.000	
	Pembinaan Pengorganisasian Karya			10 Pembinaan	10.000.000	Pembinaan Pengorganisasian Karya			10 Pembinaan	10.000.000	
20190322	Kepuasan Pemilik/pelebaran yang Pembinaan Karya		Jumlah pemilik yang diberikan kemudahan produksi	1 Pembinaan	10.000.000	Pembinaan Pemilik/pelebaran yang Pembinaan Karya		Jumlah pemilik yang diberikan kemudahan produksi	1 Pembinaan	10.000.000	
20190323	Pembinaan Pemilik/pelebaran yang Pembinaan Karya		Jumlah pemilik/pelebaran yang diberikan kemudahan produksi	1 Pembinaan	10.000.000	Pembinaan Pemilik/pelebaran yang Pembinaan Karya		Jumlah pemilik/pelebaran yang diberikan kemudahan produksi	1 Pembinaan	10.000.000	
	REKAM			10.0%	10.000.000	REKAM			10.0%	10.000.000	
	Kepuasan Pemilik/pelebaran yang Pembinaan Karya			1 Pembinaan	10.000.000	Kepuasan Pemilik/pelebaran yang Pembinaan Karya			1 Pembinaan	10.000.000	
20190324	Program Pembinaan Tenaga Kerja	Kota Bekasi	Pembinaan Tenaga Kerja yang Terampil	70%	100.000.000	Program Pembinaan Tenaga Kerja	Kota Bekasi	Pembinaan Tenaga Kerja yang Terampil	70%	100.000.000	

KODE	PERENCANAAN 2021					ANALISIS KEMUTUHAN					CATATAN REMARK
	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PENCAPAIAN PROGRAM KEGIATAN SOSIAL	TARGET CAPAIAN	PAU/ HOKIAT/ PIA	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PENCAPAIAN PROGRAM KEGIATAN SOSIAL	TARGET CAPAIAN	PAU/ HOKIAT/ PIA	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
21736121	Pelaksanaan Kerja Kerja B. Dasar Kampung (Kas)		Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan Kerja Kerja Kas yang yang terdapat dalam target	100%	121.125.000	Pelaksanaan Kerja Kerja B. Dasar Kampung (Kas)		Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan Kerja Kerja Kas yang yang terdapat dalam target	100%	121.125.000	
21736231.1 E	Pelaksanaan Kerja Kerja		Jumlah Kerja Kas yang dibutuhkan untuk program KAMPUNG KAS	1 Orang	90.000.000	Pelaksanaan Kerja Kerja		Jumlah Kerja Kas yang dibutuhkan untuk program KAMPUNG KAS	1 Orang	90.000.000	
	REKOR					REKOR					
	Indikator Tersebut			1 Orang	90.000.000	Indikator Tersebut			1 Orang	90.000.000	
21736231.1 E	Pelaksanaan KAMPUNG KAS		Jumlah Kerja Kas yang dibutuhkan untuk program pelaksanaan KAMPUNG Kas	10 Orang	37.375.000	Pelaksanaan KAMPUNG KAS		Jumlah Kerja Kas yang dibutuhkan untuk program pelaksanaan KAMPUNG Kas	10 Orang	37.375.000	
	REKOR					REKOR					
	Pelaksanaan Kerja Kerja KAMPUNG KAS			10 Orang	37.375.000	Pelaksanaan Kerja Kerja KAMPUNG KAS			10 Orang	37.375.000	
217364121	Pelaksanaan Monev Kas Kas		Pelaksanaan Fasilitas pelaksanaan Monev Kas Kas (P) yang yang terdapat dalam target	100%	121.125.000	Pelaksanaan Monev Kas Kas		Pelaksanaan Fasilitas pelaksanaan Monev Kas Kas (P) yang yang terdapat dalam target	100%	121.125.000	

KODE	PERUBAHAN RENCANA 2023					KUALA KUALITAS KEGIATAN					CATATAN & REMARKS
	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN KUALITAS KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAHANG KEGIATAN PAHANG	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN KUALITAS KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAHANG KEGIATAN PAHANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023-01-01	2023-01-01		Jumlah peserta yang mengikuti program kegiatan sub kegiatan kegiatan	40 Orang	100.000.000	2023-01-01	2023-01-01	Jumlah peserta yang mengikuti program kegiatan sub kegiatan kegiatan	40 Orang	100.000.000	
			Jumlah Peserta Program Kegiatan Sub Kegiat	20 Orang	100.000.000			Jumlah Peserta Program Kegiatan Sub Kegiat	20 Orang	100.000.000	
			Jumlah Peserta Program Kegiatan Sub Kegiat	20 Orang	100.000.000			Jumlah Peserta Program Kegiatan Sub Kegiat	20 Orang	100.000.000	
2023-01-01	2023-01-01		Jumlah orang yang mengikuti program kegiatan sub kegiatan kegiatan	20 Orang	100.000.000	2023-01-01	2023-01-01	Jumlah orang yang mengikuti program kegiatan sub kegiatan kegiatan	20 Orang	100.000.000	
2023-01-01	2023-01-01		Jumlah orang yang mengikuti program kegiatan sub kegiatan kegiatan	20 Orang	100.000.000	2023-01-01	2023-01-01	Jumlah orang yang mengikuti program kegiatan sub kegiatan kegiatan	20 Orang	100.000.000	
2023-01-01	2023-01-01		Jumlah orang yang mengikuti program kegiatan sub kegiatan kegiatan	20 Orang	100.000.000	2023-01-01	2023-01-01	Jumlah orang yang mengikuti program kegiatan sub kegiatan kegiatan	20 Orang	100.000.000	

KODE	PERUBAHAN RPT 2023					KAREKTERISTIK KEGIATAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU NERAKAT (Rp)	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU NERAKAT (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.04.1.01.1	Pembinaan dan Supervisi Perancangan RPA yang Lulus Pada Tahun 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Pembinaan dan Supervisi Perancangan RPA	24 orang	42.000.000	Pembinaan dan Supervisi Perancangan RPA yang Lulus Pada Tahun 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Pembinaan dan Supervisi Perancangan RPA	24 orang	42.000.000	
	SAKSIAN					SAKSIAN					
	Pengembangan Lembar Kerja dan Instrumen penilaian dan penyuntingan TKA			24 orang	42.000.000	Pengembangan Lembar Kerja dan Instrumen penilaian dan penyuntingan TKA			24 orang	42.000.000	
102.04.1.01.2	Pengembangan Instrumen	Kab. Bantul	Pembinaan dan Supervisi Perancangan RPA yang Lulus Pada Tahun 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	8%	1.887.275.000	Pengembangan Instrumen	Kab. Bantul	Pembinaan dan Supervisi Perancangan RPA yang Lulus Pada Tahun 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	8%	1.887.275.000	
		Kab. Bantul	Pembinaan dan Supervisi Perancangan RPA yang Lulus Pada Tahun 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	8%			Kab. Bantul	Pembinaan dan Supervisi Perancangan RPA yang Lulus Pada Tahun 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	8%		
102.04.1.01.3	Pengembangan dan Pembinaan Penilaian Kinerja Individu, Blok Peta dan Penilaian Penilaian di Daerah Kabupaten / Kota		Pembinaan dan Supervisi Perancangan RPA yang Lulus Pada Tahun 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	1.887.275.000	Pengembangan dan Pembinaan Penilaian Kinerja Individu, Blok Peta dan Penilaian Penilaian di Daerah Kabupaten / Kota		Pembinaan dan Supervisi Perancangan RPA yang Lulus Pada Tahun 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	1.887.275.000	

KODE	PROGRAM KEGIATAN 2013					MISI KUALITAS/KEHUTUKAN					DASAR & PESTING
	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PASOK BAKU/TAHAP	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PASOK BAKU/TAHAP	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
207203.001.1	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Pendidikan yang Dipekerjakan	2 Petani	20.000.000	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Pendidikan yang Dipekerjakan	4 Petani	20.000.000	
	INDUKSI					INDUKSI					
	Penyuluhan bagi Petani Kals			30 Orang	30.000.000	Penyuluhan bagi Petani Kals			30 Orang	30.000.000	
	Penyuluhan bagi Petani Kals			30 Orang	30.000.000	Penyuluhan bagi Petani Kals			30 Orang	30.000.000	
	Penyuluhan bagi Petani Kals			40 Orang	40.000.000	Penyuluhan bagi Petani Kals			40 Orang	40.000.000	
207203.001.2	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah peternak perikanan yang terdistribusi	10 Petani	20.000.000	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah peternak perikanan yang terdistribusi	10 Petani	20.000.000	
	INDUKSI					INDUKSI					
	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 Petani	20.000.000	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 Petani	20.000.000	
	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 Petani	20.000.000	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 Petani	20.000.000	
	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 Petani	20.000.000	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 Petani	20.000.000	
207203.001.3	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKJ Tripartit yang Dipekerjakan	10 LKJ	20.000.000	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKJ Tripartit yang Dipekerjakan	10 LKJ	20.000.000	
	INDUKSI					INDUKSI					
	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 LKJ	20.000.000	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 LKJ	20.000.000	
	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 LKJ	20.000.000	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 LKJ	20.000.000	
	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 LKJ	20.000.000	Pengembangan Pendidikan Keluarga Industri, Mipak Kals, dan Persempitan Persebaran yang Berakibat / Berakibat pada Kependudukan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			10 LKJ	20.000.000	

KODE	PERENCANAAN 2023					ANALISIS KELOMPOK					CATATAN REVISI
	PROGRAM KEGIATAN SUB KELOMPOK	LOKASI	INDUKSI PROGRAM KELOMPOK KELOMPOK	TARGET Jumlah	PAJANG Jumlah	PROGRAM KEGIATAN SUB KELOMPOK	LOKASI	INDUKSI PROGRAM KELOMPOK KELOMPOK	TARGET Jumlah	PAJANG Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023.01.01	Pengembangan Pelayanan Jawab Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Pengembangan program jawaban social tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	2000 orang	1.000.000.000	Pengembangan Pelayanan Jawab Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Pengembangan program jawaban social tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	2000 orang	1.000.000.000	
	INDUKSI					INDUKSI					
	Meningkatkan kualitas pengantar tenaga kerja ke luar negeri			40 orang	10.000.000	Meningkatkan kualitas pengantar tenaga kerja ke luar negeri			40 orang	10.000.000	
	Penyediaan pelatihan kejuruan dan kesehatan kerja			40 orang	40.000.000	Penyediaan pelatihan kejuruan dan kesehatan kerja			40 orang	40.000.000	
	Meningkatkan kualitas kejuruan dan kesehatan kerja di perusahaan			40 orang	40.000.000	Meningkatkan kualitas kejuruan dan kesehatan kerja di perusahaan			40 orang	40.000.000	
	Meningkatkan kualitas kejuruan dan kesehatan kerja di perusahaan			40 orang	40.000.000	Meningkatkan kualitas kejuruan dan kesehatan kerja di perusahaan			40 orang	40.000.000	
	Peningkatan kualitas kejuruan dan kesehatan kerja di perusahaan dan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan (Kesejahteraan Pekerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja)			2000 orang	1.000.000.000	Peningkatan kualitas kejuruan dan kesehatan kerja di perusahaan dan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan (Kesejahteraan Pekerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja)			2000 orang	1.000.000.000	
	INDUKSI				1.000.000.000	INDUKSI				1.000.000.000	

2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berikut kajian dalam penelitian usulan program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berdasarkan kepada Program-program Nasional dan prioritas kebutuhan masyarakat wilayah Kabupaten Mojokerto, dimana dapat dilihat pada Tabel TC-32.

TABEL TC-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NRHL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 – 2026, maka diperoleh hasil telaaah sebagai berikut:

- **Visi**

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong

- **Misi**

Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan

- **Tujuan**

Meningkatkan pdayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja serta sebagai upaya menurunkan pengangguran

- **Sasaran**

1. Meningkatnya kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
2. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial;
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang norma ketenagakerjaan;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas nasional tersebut maka disusun program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 antara lain:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program penempatan tenaga kerja
3. Program hubungan industrial

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, Dinas Tenaga Kerja Melaksanakan Misi Ke 2 “Membangun Kemandirian Ekonomi

Berdimensi Kerakyatan". Sementara Tujuannya adalah "Penurunan Angka Pengangguran" dan mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. *Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;*
2. *Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan*

Berikut ini dilampirkan Tabel 3.2.1 sebagai pedoman sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

TABEL 3.1.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pemertan Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPPT)	5,73	5,42	5,42	5,09	4,76	4,43	4,10
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	Inda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	70,00 (R)	75,00 (R)	70,50 (R)	71,00 (R)	71,50 (R)	72,00 (R)	72,50 (R)
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Serta Pencapaian Puluhan Kesempatan Kerja Baru Perangkat Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Pindahan Yang Disusutkan Dan Karyakala	85%	80%	80%	85%	87%	90%	95%
			Persentase Penyertaan Tenaga Kerja	32%	32%	32%	34%	34%	35%	36%
		Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Damai Dan Produktif Serta Optimalisasi Penguatan Kemandirian	Persentase Tingkat Penutupan Hubungan Industrial Di Perusahaan		0%	0%	1%	1%	0%	1%
			Persentase Perusahaan Yang Menghormati Pekerja Dalam Jumlah Kecil		1%	1%	0%	1%	1%	1%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan. Dimana pada tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang Ketenagakerjaan.

Adapun program dan kegiatan di bidang Ketenagakerjaan sebagaimana Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana pada Tabel TG – 33.

TABEL TC-33
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	URUSAN BAKU URUSAN PERHIMPUNAN DAERAH DAS PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERUBAHAN MAJU PERUBAHAN TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUPAN DANA PROG INDIKATOR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUPAN DANA PROG INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN MAJU BUKAN PELAYANAN DASAR								
	KETERANGAN								
2.01.01	Program Peningkat Daya Pemasokan Daerah Kebudayaan / Seni	Rata Rata Peningkat Daerah	Kab. Mojokerto	RATA RATA	2.01.01.000	APBD		RATA RATA	2.01.01.000
		Jumlah orang yang terampil dalam dan Terampil dalam Seni Budaya		Jumlah				Jumlah	
2.01.01.01	Pemecahan, Pengembangan dan Ekstensi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang terampil sesuai target		100%	12.113.000			100%	14.840.300
2.01.01.01.01	Pengusunan Dokumen Pemecahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemecahan Perangkat Daerah		3 Dokumen	1.300.000			3 Dokumen	6.250.000
	INDIKATOR								
	Dokumen Pemecahan Kerja APBD			1 Dokumen	1.750.000			1 Dokumen	4.120.000
	Dokumen Pemecahan Kerja APBD			1 Dokumen	1.750.000			1 Dokumen	1.120.000
2.01.01.01.02	Ekstensi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Ekstensi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	1.813.000			4 Laporan	6.300.000
	INDIKATOR								
	Pengajuan Dokumen Ekstensi Kerja Tahun			4 Dokumen	1.800.000			4 Dokumen	2.174.000

KODE	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN SARAN/PAGU INDIKATOR	NUMERIK DATA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN SARAN/PAGU INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Dokumen Iqf			1 Dokumen	1.000.000			1 Dokumen	1.000.000
	Pengadaan Dokumen Mdn			1 Dokumen	1.000.000			1 Dokumen	1.000.000
	Gedung Ruang Kegiatan Masyarakat Pelayanan Ketercapaian			1 Gedung	-			1 Gedung	-
207.01.101	Administrasi Keuangan Penghutang Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Penghutang Daerah		90%	4.801.000.000			90%	4.801.000.000
207.01.101.01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah uang yang menyetor gaji dan tunjangan ASN		36 Orang/bulan	4.801.000.000			36 Orang/bulan	4.801.000.000
	RINCIAN :								
	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Orang/bulan	2.144.700.000			36 Orang/bulan	2.144.700.000
	Tambahan Penghasilan ASN (TPA)			36 Orang/bulan	2.080.000.000			36 Orang/bulan	2.080.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pelaksanaan tugas yang ASN			36 Orang/bulan	57.300.000			36 Orang/bulan	57.300.000
	Pengadaan Uang Muka Kematangan dan gaji dan Administrasi Office dan lainnya			100 Orang/bulan x 12	308.000.000			100 Orang/bulan x 12	308.000.000
207.01.101.02	Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil pengadaaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		10 dokumen	-			10 dokumen	-
	RINCIAN :								
	Pengadaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							10 Dokumen	-
207.01.101	Administrasi Keuangan Penghutang Daerah	Indeks pelaksanaan dan kinerja tugas kerja		70%	-			70%	-
207.01.101.01	Pengadaan Pelajar Dinas Swasta Adibud, Kampungkampung	Jumlah paket pelajaran dinas swasta adibud kampungkampung		1 Paket	-			1 Paket	-
	RINCIAN :								
	Pembayaran Pengadaan Pelajar Dinas			1 Paket	-			1 Paket	-

KODE	URUSAN SISWA, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN)	PERUBAHAN TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PERUBAHAN BAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PADU INDIKATOR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PADU INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.2.36	Administrasi Dinas Perumahan Daerah	Pemantauan Penerimaan Administrasi urusan perumahan Daerah sesuai kebutuhan		100%	102.854.000			100%	102.854.000
2.07.01.2.36.01	Pengelolaan Fasilitas dan Peningkatan Ketersediaan	Jumlah paket pelayanan dan pengelolaan kamar yang disediakan		8 Paket	10.000.000			8 Paket	22.375.000
	RINCIAN								
	Pemantauan Penerimaan Fasilitas dan Peningkatan Ketersediaan			8 Paket	10.000.000			8 Paket	22.375.000
2.07.01.2.36.04	Pengelolaan Fasilitas Logistik Kamar	Jumlah paket bahan logistik kamar yang disediakan		3 Paket	9.000.000			3 Paket	9.000.000
	RINCIAN								
	Pengelolaan Fasilitas dan Logistik Kamar			3 Paket	9.000.000			3 Paket	9.000.000
2.07.01.2.36.05	Pengelolaan Sarung-Catatan dan Pengendalian	Jumlah paket barang catatan dan pengendalian yang disediakan		13 Paket	25.000.000			13 Paket	27.300.000
	RINCIAN								
	Pengelolaan Sarung-Catatan dan Pengendalian			13 Paket	25.000.000			13 Paket	27.300.000
2.07.01.2.36.07	Pengelolaan Sahas / Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan		1 Paket	20.000.000			1 Paket	20.000.000
	RINCIAN								
	Pengelolaan Sahas / Material			1 Paket	20.000.000			1 Paket	20.000.000
2.07.01.2.36.08	Pengelolaan Laporan Ketersediaan dan Ketersediaan SAPD	Jumlah laporan penyelenggaraan laporan ketersediaan dan ketersediaan SAPD		100 Laporan	12.000.000			100 Laporan	20.300.000
	RINCIAN								
	Pengelolaan Laporan Ketersediaan dan Ketersediaan SAPD			100 Laporan	12.000.000			100 Laporan	20.300.000
2.07.01.2.36	Pengelolaan Jasa Pemondokan Dinas Perumahan Daerah	Pemantauan Penerimaan Jasa Pemondokan urusan Perumahan Daerah sesuai kebutuhan		100%	187.800.000			100%	200.300.000

KODE	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KERUTUKAN DAFTAR PADI INDIKATOR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KERUTUKAN DAFTAR PADI INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.2.00.02	Penyediaan Jasa Pemukiman, Sumber Daya Air dan Lingkungan	Jumlah laporan penyediaan jasa pemukiman, sumber daya air dan lingkungan yang disediakan		12 Laporan	75.384.888			12 Laporan	77.260.488
	INDIKATOR:								
	Pembinaan Jasa Pemukiman			12 Lp	4.216.500			12 Lp	4.940.500
	Pembinaan Jasa Air			12 Lp	-				-
	Pembinaan Jasa Lingkungan			12 Lp	63.791.794			12 Lp	75.744.317
1.07.01.2.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan	117.828.309			12 Laporan	126.346.489
	INDIKATOR:								
	Pembinaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KSP)			12 Laporan	117.658.480			12 Laporan	126.560.000
1.07.01.2.00.10	Pembinaan Bidang Misi Daerah Peningkatan Jumlah Pemerintahan Daerah	Pembinaan bidang misi daerah dalam keadaan baik		100%	118.908.489			100%	118.908.489
1.07.01.2.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Gaya Pemeliharaan, Pelekat, dan Pelekat Pemeliharaan Daerah Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperbaiki dan dibersihkan pelek dan perawatannya		8 Lp	48.438.488			8 Lp	48.438.488
	INDIKATOR:								
	Pembinaan Pemeliharaan kendaraan dinas kantor			8 Lp	48.380.000			8 Lp	44.300.000
	Pembinaan Pelekat dan Pelekat Pemeliharaan Daerah Sama			8 Lp	4.058.488			8 Lp	4.138.488
1.07.01.2.00.03	Pembinaan / Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperbaiki dan direhabilitasi		1 Lp	80.000.000			1 Lp	80.000.000
	INDIKATOR:								
	Pembinaan Pemeliharaan gedung kantor			1 Lp	80.000.000			1 Lp	80.000.000

KODE	URUSAN/BOJANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) : SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PROJEK/ REKAPITIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA TAHUN REKAPITIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237.01.1.01.15	Pembinaan / Rehabilitasi Teknik dan Peningkatan Gedung Kantor Desa Tegayuhur (Lampu)	Jumlah asrama dan perumahan gedung kantor desa bangunan permanen yang direhabilitasi/dibangun		15 Dst	15.000.000			20 Dst	15.000.000
	BENCAN :								
	Pengadaan Kebutuhan Kertas Penerimaan Gedung Kantor			10 Dst	15.000.000			20 Dst	15.000.000
237.02	Program Pemeliharaan Tenaga Kerja	Pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi administrasi tenaga kerja		100%	12.000.000			100%	12.000.000
237.02.1.01	Pengadaan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang terbit		1 Dokumen	11.000.000			1 Dokumen	11.000.000
237.02.1.01.01	Pengadaan Rencana Tenaga Kerja Matrik	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja matrik		1 Dokumen	11.000.000			1 Dokumen	11.000.000
	BENCAN :								
	Pemutakhiran Dokumen Pemeliharaan Tenaga Kerja			1 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen	11.000.000
237.03	Program Pelatihan Kerja dan Pemeliharaan Tenaga Kerja	Pemutakhiran Pemeliharaan Rencana Pemutakhiran	KAB. Mojokerto	20%	1.200.000.000	APBD		20%	1.200.000.000
237.03.1.01	Pelaksanaan Pelatihan dan Pemeliharaan UMS Kompartemen	Jumlah orang yang telah mendapatkan pelatihan UMS Kompartemen		144 Orang	1.137.000.000			144 Orang	1.200.000.000
237.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pelatihan dan Pemeliharaan Kejurangan bagi Pekerja Kerja Industri dan Kompartemen	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan terpadu kompartemen pada tahun n		128 Orang	1.080.000.000			128 Orang	1.185.000.000
	BENCAN :								
	Pelaksanaan pelatihan Kompartemen			32 Orang	60.000.000			32 Orang	180.000.000
	Pelaksanaan pelatihan Yang Baru			96 Orang	30.000.000			96 Orang	30.000.000

KODE	URUSAN/SEKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/INDIKATOR KELOMPOK/OUTPUT/ SUB KEGIATAN)	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PROGRAM RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	AKHIR TAHUN DANA/ RAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KERUTURAN DANA/ RAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Capaian Awal Dasar			11 Orang	10.250.000			11 Orang	10.240.000
	Penyusunan Tata Kelola			11 Orang	10.180.000			11 Orang	10.140.000
	Program Penanaman Lingkungan Sosial (Peningkatan Kelembagaan Desa) (SDGHT)								
	INDIKATOR								
	Penyusunan dan Penyusunan Tata Kelola Peningkatan (SDGHT)			11 Orang	10.180.000			11 Orang	10.000.000
	Penyusunan dan Penyusunan Anggaran (SDGHT)			11 Orang	10.180.000			11 Orang	10.100.000
	Penyusunan dan Penyusunan Penyusunan Penyusunan (SDGHT)			11 Orang	10.180.000			11 Orang	10.100.000
1.07.01.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Peningkatan Produktivitas serta Barang dan Pelayanan Lembaga Pelaksana Kerja	Jumlah Kelembagaan Kelembagaan dalam rangka optimalisasi kapasitas intelektual dan peningkatan sarana prasarana produksi untuk dan produktivitas pada tahun 2023		11 Lembaga	10.000.000			11 Lembaga	10.000.000
	INDIKATOR								
	Penyusunan dan Penyusunan Penyusunan Penyusunan (SDGHT)			11 Orang	10.000.000			11 Orang	10.000.000
1.07.01.2.01	Penyusunan Lembaga Pelaksana Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelaksana Kerja yang difinans		30 Lembaga	10.000.000			30 Lembaga	10.000.000
1.07.01.3.01.01	Penyusunan Lembaga Pelaksana Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelaksana Kerja masyarakat yang difinans		30 Lembaga	10.000.000			30 Lembaga	10.000.000
	REKAP								

KODE	ORGANISASI (DINAS PERKOTAAN DAN DAERAH KOTA) DAN PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2021				CATATAN PORTNO	PERUBAHAN HALU KENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PROG INDIKATOR	BIKES DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KESUTUHAN DANA/PROG INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Layanan Pemukiman Kota (Desa)			100%	17.800.000			100%	19.415.000
	Peningkatan Pemukiman Aspek (Desa)			100 Persentase	17.800.000			100 Persentase	19.415.000
1.01.01.01.01	Konsolidasi Pemukiman pada Pemukiman Kecil	Jumlah pemukiman yang diberikan kemudahan produksi		4 Pemukiman	50.000.000			4 Pemukiman	55.000.000
1.01.01.01.02	Kelembagaan Konsolidasi Pemukiman Kapasitas Pemukiman Kecil	Jumlah pemukiman kecil yang mendapat kemudahan peningkatan produktivitas		4 Pemukiman	50.000.000			4 Pemukiman	55.000.000
	RINCIAN:								
	Konsolidasi Pemukiman Pemukiman Kecil			4 Pemukiman	50.000.000			4 Pemukiman	55.000.000
1.01.01.01.03	Pengadaan Pemukiman Tenaga Kerja	Peningkatan Layanan Pemukiman Kerja yang Terseleksi	Kab. Bantul	70%	120.000.000	APBD		70%	140.000.000
1.01.01.01.04	Pengadaan Aspek Kerja di Daerah Kependudukan Kerja	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Aspek Kerja Kerja Kerja yang mendapat kemudahan kerja		100%	137.100.000			100%	150.000.000
1.01.01.01.05	Pelayanan Aspek Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat kemudahan layanan AKAD dan AKL		1 Orang	80.000.000			3 Orang	90.000.000
	RINCIAN:								
	Tambahan Tenaga Kerja			3 Orang	80.000.000			3 Orang	90.000.000
1.01.01.01.06	Pelayanan Kependudukan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat kemudahan layanan pendaftaran kependudukan kerja		10 Orang	37.100.000			10 Orang	40.000.000
	RINCIAN:								

KODE	URUSAN BELANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN)	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PERUBAHAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PADU INDIKATOR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PADU INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			10 Orang	37.100.000			10 Orang	47.200.000
1.07.04.1.01	Pengembangan keterampilan Pemasaran Hasil	Peningkatan Fasilitas pengembangan Informasi Pemasar Hasil (PIH) yang sesuai sesuai target		100%	15.400.000			100%	15.400.000
1.07.04.1.01.01	Jasa Pm / Bursa Hasil	Jumlah jumlah jasa yang mendapatkan pelayanan melalui jasa hasil/bursa hasil		48 Orang	114.800.000			48 Orang	102.400.000
	INDIAN :								
	Jasa Pm	Jumlah Jasa Pelayanan Pemasar Hasil Pm		20 Orang	10.400.000			11 Orang	11.200.000
	Pengelola Informasi Bursa Hasil	Jumlah Yonita Pelayanan Informasi Bursa Hasil		30 Lantai	36.000.000			30 Lantai	40.400.000
1.07.04.1.01.02	Pelindungan PMI (Pm dan Pemasaran) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terlindungi pelindungan PMI		28 Orang	21.400.000			28 Orang	21.700.000
1.07.04.1.01.03	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pelajar Migran Indonesia (PMI)/Masa Migrasi Indonesia (PMI)	Jumlah PMI PMI yang dilindungi dan dipelajari kompetensinya		28 Orang	21.400.000			28 Orang	21.700.000
	INDIAN :								
	Pelindungan Calon PMI /Masa Migrasi Indonesia			28 Orang	21.400.000			28 Orang	21.700.000
1.07.04.1.01	Peningkatan Peningkatan NTA yang Lulusan Hasil Galon 1 (Galon Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah orang peserta yang dibekali fasilitas, koordinasi dan dukungan pengembangan NTA		30 orang	42.000.000			30 orang	44.200.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB- KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERUBAHAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KESIBUTIHAN DANA/ PADD INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KESIBUTIHAN DANA/ PADD INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.02.01.01	Konektivitas dan Sinkronisasi Pergerakan MRTA yang Lintas Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Pekerja yang Sibuk/Hasil Produksi, Konektivitas dan Sinkronisasi Pergerakan MRTA		20 orang	42.200.000			20 orang	42.200.000
	ENCER:								
	Pengembangan Konektivitas dan Sinkronisasi Pergerakan MRTA			20 orang	42.200.000			20 orang	42.200.000
2.07.01	Program Hubungan Industri	Pertemuan Perwakilan Hubungan Industri yang Dimusyawahi	KAB. Mojokerto	20%	1.807.073.800	JAPRO		9%	1.807.073.800
		Pertemuan Tenaga Kerja yang Terakumulasi, Jumlah Buruh		20%				9%	
2.07.01.01	Pemogohan dan Penyelenggaraan Pertemuan Hubungan Industri, Musyawir Kerja dan Pertemuan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Pertemuan melalui pemogohan dan penyelenggaraan pertemuan hubungan industri, musyawir kerja dan pertemuan perusahaan yang terakumulasi sesuai target		100%	1.807.073.800			100%	1.807.073.800
2.07.01.01.01	Pemogohan Perwakilan Hubungan Industri, Musyawir Kerja dan Pertemuan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perwakilan yang diogor		4 Perhari	100.000.000			4 Perhari	100.000.000
	ENCER:								
	Penyediaan Dana Melalui Cak Musyawir			40 Orang	2.000.000			40 Orang	2.000.000
	Pertemuan Koordinasi dan Koordinasi			50 Orang	50.000.000			50 Orang	50.000.000
	Penyediaan Fasilitas Hubungan Industri			40 Orang	40.000.000			40 Orang	40.000.000
	Pengadaan Kertas Kerja Pengantar			1 Kegiatan	50.000.000			1 Kegiatan	50.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan realitas Perubahan Renja tahun 2023 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2023 kemudian disinkronisasikan melalui P.RKPD dengan pagu indikatif sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.



TABEL 4.1
MATRIKS PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KODE	URUSAN ISU/ASPEK PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	UP	JK	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKAS	RPD KAS (Rp)	APRO MOV		SELISIR APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				RPD TERKAIT	PAGU (Rp)	AL	Rp	DIBERPAK
1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	URUSAN KAJI SUKSES PELAKSANAAN DAERAH KETERAGHIDUPAN												
207.01	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota				Indikator Kinerja Perangkat Daerah	100%	Kab. Mojokerto	5.115.000					
					Jumlah Masyarakat Yang Terampil dan Terampil Berkehidupan	100%							
207.01.2.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Pembinaan indikator program oleh tenaga kerja yang terampil sesuai target	100%		5.115.000					
207.01.2.01.01	Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		1.340.000					
	INDUKSI												
	Dokumen Pelaksana Kerja APSC					1 Dokumen		5.765.000					
	Dokumen Pelaksana Kerja PMPD					1 Dokumen		5.765.000					
207.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		5.810.000					
	INDUKSI												

KODE	URAIAN RENCANA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	SL	INDIKATOR KERJA		TARGET	LOKUS	APROK KAS Pkt	APRO PROV		DIBERIKAN APRO		
				OUTPUT	OUTCOME				SDG TERKAIT	PAOK (Rp)	K	R	DITAMBAH
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Dokumen Elektronik Tribunal					1 Dokumen		1.000.000					
	Pengadaan Dokumen KAP					1 Dokumen		1.000.000					
	Pengadaan Dokumen SAKS					1 Dokumen		1.000.000					
	Dokumen Survey Kelembutan Masyarakat Pelayanan Kehakupan					1 Laporan		-					
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		80%		4.801.061.800					
2.07.01.2.02.01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah uang yang mencaja gaji dan tunjangan PNS		38 orang/bln		4.891.881.800					
	INDUKAN												
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS					38 Orang/bln		3.481.780.000					
	Tunjangan Tunjangan ASN (TPT)					36 Orang/bln		2.300.000.000					
	Tunjangan Penghasilan Tambahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat					36 Orang/bln		16.200.000					
	Pembayaran gaji SP/ST Kabupaten/Kota bagi ASN dalam OGD dan Pemerintah					100 Orang/bln x 12		258.100.000					
2.07.01.2.02.02	Pengadaan Administrasi Pemerintahan Tugas ASN			Aspek dokumentasi hasil penyediaan administrasi pelayanan tugas ASN		10 dokumen		-					
	INDUKAN												
	Pembayaran administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							-					
2.07.01.2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Saluran pertanggungjawaban dana hingga 30% -		70%		-					

KODE	URUSAN DAN/ATAU URUSAN PEMERINTAHAN DASAR DAN PROGRAM SERTA/ATAU SUB KEGIATAN	UP	SL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBN PROV		DOKUMEN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				DIPO TERANG	PADA (Rp)	K1	P2	DIKENDAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.01.20.01	Pengadaan Paket Dosa Secara Akutif Kelengkapan			Jumlah paket paket akutif dosa secara akutif kelengkapan		1 Paket							
	INDUK												
	Pembinaan Pengadaan Paket Dosa Akutif Kelengkapan					1 Paket							
207.01.20.02	Pembinaan Pengadaan Paket Dosa Akutif Kelengkapan			Pembinaan Pengadaan Paket Dosa Akutif Kelengkapan		100%		10.000.000					
207.01.20.03	Pengadaan Paket Dosa Secara Akutif Kelengkapan			Jumlah paket paket akutif dosa secara akutif kelengkapan		1 Paket		10.000.000					
	INDUK												
	Pembinaan Pengadaan Paket Dosa Akutif Kelengkapan					1 Paket		10.000.000					
207.01.20.04	Pengadaan Paket Dosa Secara Akutif Kelengkapan			Jumlah paket paket akutif dosa secara akutif kelengkapan		1 Paket		10.000.000					
	INDUK												
	Pembinaan Pengadaan Paket Dosa Akutif Kelengkapan					1 Paket		10.000.000					
207.01.20.05	Pengadaan Paket Dosa Secara Akutif Kelengkapan			Jumlah paket paket akutif dosa secara akutif kelengkapan		1 Paket		10.000.000					
	INDUK												
	Pembinaan Pengadaan Paket Dosa Akutif Kelengkapan					1 Paket		10.000.000					
207.01.20.06	Pengadaan Paket Dosa Secara Akutif Kelengkapan			Jumlah paket paket akutif dosa secara akutif kelengkapan		1 Paket		10.000.000					
	INDUK												
	Pembinaan Pengadaan Paket Dosa Akutif Kelengkapan					1 Paket		10.000.000					
207.01.20.07	Pengadaan Paket Dosa Secara Akutif Kelengkapan			Jumlah paket paket akutif dosa secara akutif kelengkapan		1 Paket		10.000.000					
	INDUK												
	Pembinaan Pengadaan Paket Dosa Akutif Kelengkapan					1 Paket		10.000.000					

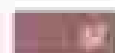
KODE	URUTAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BC	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APROKAS (Rp)	APRO PROK		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SDG TERKAIT	PADA (Rp)	KL	Rp	DITISDAS
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237 01 2 01 01	Pembinaan satuan kerja A/T					1 Poin		30.000.000					
	Pengembangan Pusat Kelembagaan dan Kelembagaan SDG			Jumlah laporan pengembangan pusat kelembagaan dan kelembagaan SDG		10 Laporan		32.000.000					
	REKONSTRUKSI												
	Pembinaan Pusat Kegiatan Desa					10 Laporan		32.000.000					
237 01 2 01	Pengadaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah			Pemaksimalan Pengadaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah secara Efektif		100%		157.000.000					
237 01 2 01 02	Pengadaan Jasa Kelembagaan, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan kelembagaan (jasa kelembagaan, sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan)		10 Laporan		70.000.000					
	REKONSTRUKSI												
	Pembinaan Jasa Pemungutan					10 Rp		1.210.000					
	Pembinaan Jasa Air					10 Rp		-					
237 01 2 01 04	Pembinaan Jasa Listrik					10 Rp		80.981.000					
	Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor			Jumlah laporan pengadaan jasa pelayanan urusan kantor yang dibutuhkan		10 Laporan		117.000.000					
	REKONSTRUKSI												
	Pembinaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor (Pusat A/T)					10 Laporan		117.000.000					
237 01 2 01	Pemeliharaan Salang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah			Pemaksimalan Salang milik daerah dalam kelembagaan baik		100%		100.000.000					

KODE	URUSAN/BOJONG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBN/DAK PnJ	APBN PRD		DOKUMEN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				INDO TERANG	PRD/ PnJ	KL	RP	DITAMBAH
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237.01.2.01.01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pelek, dan Perbaikan Kantoran (Jasa Operasional dan Lapangan)			Jumlah kantoran atau operasional atau lapangan yang finished dan dibayarkan penuh dan pertumbuhannya		3 Unit		44.000.000					
	INDUKSI:												
	Pemeliharaan Pemeliharaan Kantoran					0 Unit		40.000.000					
	Pemeliharaan Pelek dan Perbaikan Kantoran (Jasa, Kantor)					0 Unit		4.000.000					
237.01.2.01.02	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang optimal dan produktif		1 Unit		30.000.000					
	INDUKSI:												
237.01.2.01.03	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung dan bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang optimal dan produktif		1 Unit		30.000.000					
	INDUKSI:												
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit		15.000.000					
237.02	Program Pemeliharaan Tempa Kerja				Persentase program dan kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja	100%		75.000.000					
237.02.2.01	Pemeliharaan Rencana Kerja Tempa Kerja (RKT)			Jumlah Dokumen rencana kerja kerja yang selesai		1 Dokumen		75.000.000					

KODE	URUSAN BESAR/URUSAN PEMERINTAHAN DASAR DAN PROGRAM KEGIATAN SUB-URUSAN	UP	SL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APROKSI (Rp)	APSD PRON		SILUANG APBD		
				OUTPUT	OUTCOME				DIPO TERKAIT	PADU (Rp)	KL	AP	OTR/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ESTABLIH	Persiapan Sarana Tenaga Kerja Malar			Jumlah dokumen rencana tenaga kerja malar		1 Dokumen		75.000.000					
	RENCAN												
	Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Tenaga Kerja					1 Dokumen		75.000.000					
2010	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				Persentase Peserta Pelatihan Terampil Kompetensi	27%	Kab. Mojokerto	1.222.740.000					
2010101	Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Dasar Kompetensi			Jumlah orang yang telah terdistribusi pada kompetensi		142 Orang		1.110.000.000					
201010101	Pusat Pelaksanaan Pelatihan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Kerja berdasarkan Klasifikasi Kompetensi			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		100 Orang		1.000.000.000					
	RENCAN												
	Pelatihan keterampilan Komputer					20 orang		100.000.000					
	Pelatihan keterampilan Tata Rias					10 Orang		50.000.000					
	Pelatihan Operator Alat Berat					10 Orang		50.000.000					
	Pelatihan Tata Raga					10 Orang		50.000.000					
	Program Pelatihan Lingkungan Kerja (PBLK) (DIBAKUT)												
	RENCAN												
	Pelatihan Soft Skill dan Tata Kedisiplinan (DIBAKUT)					10 Orang		50.000.000					
	Pelatihan dan Tertindak Monev (DIBAKUT)					10 Orang		50.000.000					

KODE	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN SAGAM DAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGATAN	UP	SL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APROKIAS Rp	APROK PROY		LOKASI APEN		
				OUTPUT	OUTCOME				INDO TERRAIT	PAKSI PRO	KL	Rp	UTRAN
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengaturan Sistem Perbaikan dan (2024/25)					10 Orang		20.000.000					
207.01.21.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Pengelolaan Instansi serta Swasta dan Pemerintah Lembaga Pelatihan Kerja			Jumlah keaspekkan Koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instansi dan peningkatan kualitas sistemasi pelatihan kerja dan produktifitas pada tahun n		10 Lembaga		50.000.000					
	INDOKAS Pemerintah dan swasta untuk tahun 2024					10 Lembaga		50.000.000					
207.01.21.02	Pendukung Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang aktif		10 Lembaga		10.500.000					
207.01.21.02.01	Pendukung Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang aktif		10 Lembaga		10.500.000					
	INDOKAS Pemerintah dan swasta untuk tahun 2024					10 LK		17.000.000					
	Pendukung Pengangan dan Pagar					10 Pemerintah		17.000.000					
207.01.21.02	Kemampuan Produktifitas pada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan yang diberikan kemampuan produktifitas		1 Perusahaan		10.500.000					

KODE	URAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEBATANMASIAAN SLEK KEGIATAN	DP	SL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APROKAS (Rp)	APROK PROV		Jumlah APROK		
				OUTPUT	OUTCOME				SDG TERNAT	PADG (Rp)	KL	Rp	DIKURAI
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.01.1.04.01	Pembinaan Kemitraan Produktifitas, Kapasitas Pemulaan Kerja			Jumlah perusahaan kecil yang mendapat bantuan peningkatan produktivitas		4 Perusahaan		50.000.000					
	RENCANA												
	Kemitraan Produktifitas Pemulaan Kerja					4 Perusahaan		50.000.000					
207.04	Program Pengembangan Tenaga Kerja			Peningkatan Informal Lapangan Kerja yang Terampil	Peningkatan Informal Lapangan Kerja yang Terampil	10%	Kab. Mojokerto	275.000.000					
207.04.1.01	Pengembangan Akademi Kerja di Daerah Kabupaten / Kota			Peningkatan Fasilitas Pelayanan Akademi Kerja Kabupaten yang terampil sesuai target	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Akademi Kerja Kabupaten yang terampil sesuai target	100%		127.150.000					
207.04.1.01.01	Pengembangan Akademi Kerja			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKG	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKG	1 Orang		50.000.000					
	RENCANA												
	Fasilitas Terampil					1 Orang		50.000.000					
207.04.1.01.05	Pelatihan Keterampilan Kerja			Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program pelatihan keterampilan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program pelatihan keterampilan kerja	10 Orang		27.150.000					
	RENCANA												
	Peningkatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)					10 Orang		27.150.000					
207.04.2.01	Pengembangan Informal Pasar Kerja			Peningkatan Fasilitas pengalihan Informal Pasar Kerja (IPK) yang terampil sesuai target	Peningkatan Fasilitas pengalihan Informal Pasar Kerja (IPK) yang terampil sesuai target	100%		198.000.000					



KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN SARAN DAN PROGRAM KEGIATAN SAS KEHATIAN	UP	KL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APRO KAB (Rp)	APRO PRON		URUTAN APERK		
				INPUT	OUTCOME				SAKSI TERKAIT	PASOK PIL	KL	KE	STANDAR
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1270410000	24 Juli / Bursa Kerja			Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair Bursa Kerja	40 Orang		138.650.500					
	RINCIAN												
	24 Juli			Jumlah Ward Pemantau Pemantau aktif	Jumlah Ward Pemantau Pemantau aktif	30 Ward		100.000.500					
	Perwakilan Informasi Bursa Kerja			Jumlah Peserta Pengunjung Informasi Bursa Kerja	Jumlah Peserta Pengunjung Informasi Bursa Kerja	10 Lantai		30.000.000					
1270410000	Pelindungan PMI-PK dan Panti Pemukiman di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah orang terdampak perlindungan PMI	Jumlah orang terdampak perlindungan PMI	20 Orang		21.000.000					
1270410000	Pelindungan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPN/ PMI yang dilindungi dan dilindungi kompetensi	Jumlah CPN/ PMI yang dilindungi dan dilindungi kompetensi	20 Orang		21.000.000					
	RINCIAN												
	Pelindungan Calon PMI (Panti Migran Indonesia)					20 Orang		21.000.000					
1270410000	Penelitian Pengembangan NTA yang Lulus Uji Coba dalam 1 tahun Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitas, koordinasi dan administrasi pengembangan NTA	Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitas, koordinasi dan administrasi pengembangan NTA	20 orang		21.000.000					
1270410000	Koordinasi dan Administrasi Pengembangan NTA yang Lulus Uji Coba dalam 1 tahun Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Orang Peserta yang diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Administrasi Pengembangan NTA	Jumlah Orang Peserta yang diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Administrasi Pengembangan NTA	20 orang		42.000.000					
	RINCIAN												



KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KECANTAN/ BID KEKANTAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APROKSI (Rp)	APRO PROY		USULAN APEN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	K2	Rp	STREDAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan sumberdaya dan kelembagaan desa/kelurahan dan percontohan KPA					30 orang		42.000.000					
2.07.01	Pengaplikasian Hilirisasi Industri			Persentase Persebaran Kebijakan Industri Yang Ditentukan	Persentase Persebaran Kebijakan Industri Yang Ditentukan	95%	Kab. Mojokerto	1.847.275.000					
				Persentase Sektor Kerja Yang Tersebar Jumlah Besar	Persentase Sektor Kerja Yang Tersebar Jumlah Besar	85%							
2.07.01.01	Peningkatan dan Penguatan Persebaran Kebijakan Industri, Sektor Kerja dan Penguatan Persebaran di Daerah, Kebijakan Kerja			Persentase Industri pengolahan dan pengolahan jasa/kegiatan kegiatan industri, merek kerja dan pengembangan perusahaan yang terdapat sesuai target	Persentase Industri pengolahan dan pengolahan pengolahan industri, merek kerja dan pengembangan perusahaan yang terdapat sesuai target	100%		1.847.275.000					
2.07.01.01.01	Peningkatan Persebaran Hilirisasi Industri, Sektor Kerja, dan Penguatan Persebaran yang Berwujud / Berwujud pada Kabupaten di 1 (satu) Daerah Kebijakan / Kota			Jumlah Persebaran yang diaplikasikan	Jumlah Persebaran yang diaplikasikan	1 Persebaran		180.000.000					
	INDUKSI												
	Indikator Jumlah Masyarakat yang Mendapat					40 orang		40.000.000					
	Peningkatan sektor kerja dan usaha kegiatan					30 orang		30.000.000					
	Peningkatan Kebijakan Hilirisasi Industri					40 orang		40.000.000					
	Peningkatan Kerja dan Pengaplikasian					21 orang		21.000.000					

KODE	URUTAN BIDANG URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH (DAN PROGRAM KEGIATAN) SUB-KEJATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAS (Rp)	APBD PROV		REKAMAN APBD		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERANG	PAGE (Rp)	KL	Rp	DITESKAN
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.01.2.03	Pembiayaan Pemeliharaan Hubungan Industri, Migas, Kark, dan Pemukiman Perumahan yang Berakumulasi / Berakumulasi pada Kawasan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah perkara pemeliharaan yang berakumulasi	Jumlah perkara pemeliharaan yang berakumulasi	10 Perkara		20.000.000					
	RINCIAN												
	Teknologi Kaku Pemeliharaan Hubungan Industri					10 Perkara		20.000.000					
207.01.2.04	Pelaksanaan Operasional Lantai Karyawan Tipe 2000 Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah LKS Tipe 2000 yang aktif	Jumlah LKS Tipe 2000 yang aktif	1 Lantai		40.000.000					
	RINCIAN												
	Pemeliharaan Lantai Karyawan Tipe 2000					1 Lantai		40.000.000					
207.01.2.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Terselenggaranya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terselenggaranya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	2700 Orang		1.547.575.345					
	RINCIAN												
	Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan cara lain					40 Orang		17.019.750					
	Pengadaan perlengkapan kesehatan dan kebutuhan kerja					40 Orang		40.019.750					
	Meningkatkan pendapatan pekerja sosial dengan cara lain					40 Orang		40.019.750					
	Meningkatkan kesejahteraan pekerja sosial dengan cara lain					30 Orang		10.019.750					

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Pengusunan perubahan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2023 yang akan datang.

b. Kaitan-kaidah Pelaksanaan

Bahwa Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Penetapan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 telah disesuaikan dengan kondisi Renstra 2021-2026 karena Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, September 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,**



BAMBANG SURYANTO, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690521 199602 1 001



KODE	URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN DOK KESEHATAN	UP	BL	INDUKTOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB Rp	APBD PROV		SILABUS APBD		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERDAFTAR	PADA Rp	KL	Rp	STREDAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Bina Penguasaan dan Pengembangan Teknik Perak Tanya Mulas Pemerintah Daerah dan Cakupan Timbangan (BPK-OT)					2170 Orang		1.400.000,00					
	Jumlah							1.400.000,00					

BAB V PENUTUP

a. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2023 yang akan datang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Bahwa Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/S869 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 telah disesuaikan dengan kondisi Renstra 2021-2026 karena Hasil yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah dielaborasi dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, September 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO



BAMBANG PURWANTO, SH., MH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650521 199602 1 001